

Konsep Dasar Filsafat Pemerintahan

Drs. Muhammad Tamar, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul 1 berisi uraian tentang Konsep Dasar Filsafat Pemerintahan, di mana dalam pembahasannya akan mengantar Anda untuk memahami apa sebenarnya filsafat pemerintahan itu. Dalam Modul 1 ini, dititikberatkan pada pemahaman filsafat dan pemerintahan. Materi modul ini penting sekali artinya bagi Anda untuk memahami materi modul selanjutnya, sebab memberi dasar-dasar pengertian tentang filsafat pemerintahan.

Materi modul ini, akan membantu Anda untuk menjelaskan tentang pengertian filsafat pemerintahan, berbagai pemikiran tentang filsafat pemerintahan, dan tinjauan filosofis tentang tanggung jawab pemerintahan. Secara garis besar modul ini dibagi dalam 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1 : Pengertian Filsafat Pemerintahan.

Kegiatan Belajar 2 : Menelusuri Jejak Pemikiran Filsafat Pemerintahan.

Kegiatan Belajar 3 : Tinjauan Filosofis tentang Tanggung Jawab Pemerintahan.

Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari Modul 1 adalah Anda akan lebih memahami berbagai pengertian dan konsep-konsep dasar filsafat pemerintahan, menambah perbendaharaan pengetahuan tentang filsafat pemerintahan melalui penelusuran jejak pemikiran tentang filsafat pemerintahan, dan pada akhirnya dapat menjelaskan tinjauan filosofis tentang tanggung jawab pemerintahan.

Secara umum, kompetensi yang diharapkan setelah Anda mempelajari Modul 1 adalah Anda mampu menjelaskan konsep dasar filsafat pemerintahan, sedangkan kompetensi khusus yang diharapkan adalah Anda mampu menjelaskan:

1. pengertian filsafat pemerintahan;
2. pemikiran filsafat pemerintahan;
3. tinjauan filosofis tentang tanggung jawab pemerintahan.

Selamat Belajar!

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Filsafat Pemerintahan

Istilah filsafat pemerintahan merupakan rangkaian dari dua suku kata, yaitu filsafat dan pemerintahan. Oleh karena itu, sebelum membahas pengertian filsafat pemerintahan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sebenarnya filsafat dan apa sebenarnya pemerintahan itu. Secara etimologis filsafat berawal dari perkataan Inggris *philosophy*, yang berasal dari kata Yunani *philosophia* yang lazim disebut sebagai cinta kearifan. Akar katanya adalah *philos* (*philia*, cinta) dan *sophia* (kearifan). Menurut pengertian semula dari Yunani kuno itu filsafat berarti cinta kearifan. Orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah *philosophia* ialah Pythagoras (572–497 SM). Baginya, kearifan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Ketika ia ditanya apakah ia orang yang arif? Ia menjawab bahwa dirinya hanya pencinta kearifan.

Cakupan pengertian *sophia* sejak awalnya ternyata luas sekali. Dahulu *sophia* tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepada kepandaian pengrajin, dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan soal-soal praktis (F. E. Peters, *dalam* The Liang Gie, 1991: 29).

Secara umum, filsafat dapat dirumuskan sebagai upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa objek material dari filsafat adalah manusia, sama dengan objek ilmu lainnya; yang membedakan adalah dari sudut pandang mana suatu ilmu menyoroti "manusia" itu. Filsafat dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan karena dari filsafatlah awal berkembangnya cabang-cabang ilmu lainnya. Dalam filsafat terdapat beberapa cabang untuk mengungkap hakikat dasar dari kehidupan manusia. Salah satu cabangnya adalah filsafat pengetahuan (epistemologi), yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan metode-metode dan sahnya pengetahuan.

Dengan bertitik tolak dari pandangan filsafat pengetahuan dalam menyoroti Ilmu Pemerintahan tentu akan memperjelas eksistensi pemerintahan sebagai suatu ilmu karena melalui kaidah-kaidah pemikiran filsafat pengetahuan akan ditelusuri secara saksama Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Namun, dalam menyoroti Ilmu

Pemerintahan dari sudut pandang filsafat tidak cukup hanya dari filsafat pengetahuan karena Ilmu Pemerintahan bukan ilmu murni, tetapi adalah ilmu terapan. Untuk itu, diperlukan pemikiran filsafat dari sudut praktik penyelenggaraan yang akan bersentuhan dengan filsafat politik dan etika. Tentunya sesuai dengan dimensi ruang dan waktu di mana praktik penyelenggaraan pemerintahan itu berlangsung.

Apabila kita merujuk kepada berbagai pengertian dan pemahaman beberapa ahli dapat ditemukan berbagai corak ragam pengertiannya tentang filsafat, di mana pada dasarnya mengarah pada substansi yang sama, yaitu kebenaran atau hal yang benar karena semua filosof berupaya untuk menemukan hal yang benar. Tentunya dapat dipahami bahwa untuk menemukan hal yang benar bukanlah persoalan yang mudah karena harus melalui pemikiran dan penalaran yang sistematis.

Sering kita mendengar orang mengatakan bahwa filsafat “tidak membuat roti”, hal ini benar karena filsafat memang tidak memberikan petunjuk teknis untuk membuat sesuatu, tetapi filsafat memberikan pemahaman dan tindakan kepada kita untuk melakukan sesuatu “yang benar”. Berdasarkan analogi tadi filsafat “tidak membuat roti”, namun filsafat dapat membantu dalam menyiapkan tungkunya, menyisihkan noda-noda dari tepungnya, menambah jumlah bumbunya secara layak, dan mengangkat roti itu dari tungku pada saat yang tepat. Dari hal itu, dapat dipahami bahwa tujuan filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya, dan menerbitkan, serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita pada pemahaman dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut dalam menyoroti “pemerintahan” sebagai ilmu dan seni akan melahirkan pemikiran filsafat pemerintahan. Pemerintahan sebagai ilmu dan seni mempunyai banyak pengertian dari berbagai sudut pandang para ahli (akan dibahas pada kegiatan belajar selanjutnya). Untuk pengertian awal kajian pemerintahan dapat ditinjau dari segi etimologis sebagai berikut:

Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, di mana pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah sisipan “me” menjadi pemerintah, berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran “an”

menjadi pemerintahan, berarti pembuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat).

Apabila analogi filsafat tersebut di atas ditujukan kepada kegiatan pemerintahan maka filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah, tetapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar (hal ini akan diperjelas pada modul selanjutnya).

Akan tetapi, apabila pemerintahan disoroti dari sudut pandang filsafat pengetahuan di dalamnya akan berfokus pada masalah apakah pemerintahan itu sebagai suatu ilmu atau tidak, apakah pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat dan susunan ilmu pengetahuan (mengenai hal ini akan diperjelas pada Modul 2).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Apa yang Anda ketahui tentang filsafat pemerintahan?

Petunjuk Jawaban Latihan

Filsafat merupakan pengungkapan pengembaraan manusia di dunia menuju ke akhirat. Filsafat mengantarkan manusia ke pemikiran yang hakiki (kebenaran) tentang sesuatu hal. Pemerintahan, artinya kegiatan memerintah dilakukan oleh pemerintah atas nama kekuasaan (negara) terhadap masyarakat yang diperintah. Jadi, filsafat pemerintahan adalah suatu ikhtiar pemikiran untuk menemukan pemahaman yang hakiki tentang pemerintahan yang tegak dan benar. Silakan Anda kembangkan sendiri petunjuk jawaban ini. Jawablah dengan menggunakan kalimat Anda sendiri!

**RANGKUMAN**

Secara umum, filsafat dapat dirumuskan sebagai upaya manusia untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembangan manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar.

Objek material dari filsafat adalah manusia, sama dengan objek ilmu lainnya; yang membedakan adalah dari sudut pandang mana suatu ilmu menyoroti manusia. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita pada pemahaman dan pemahaman membawa kita ke tindakan yang lebih layak.

Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat).

Filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah, tetapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Secara umum, filsafat dapat dirumuskan sebagai upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembangan manusia di dunia menuju
 - A. ke langit
 - B. kebenaran
 - C. akhirat secara mendasar
 - D. kesenangan

- 2) Filsafat dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan dan salah satu cabangnya adalah filsafat pengetahuan (epistemologi), yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal mula
 - A. demokrasi
 - B. manusia
 - C. alam
 - D. susunan metode dan sahnya pengetahuan

Pilihlah:

- A. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar dan mempunyai hubungan sebab akibat.
- B. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat.
- C. Apabila salah satu dari kedua pernyataan benar.
- D. Apabila kedua pernyataan salah.

- 3) Filsafat memberi pemahaman dan arah tindakan untuk melakukan sesuatu yang benar.

Sebab

Filsafat memberi petunjuk teknis untuk membuat sesuatu.

- 4) Secara etimologis istilah pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh.

Sebab

Setelah mendapat sisipan "me" menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan berarti cara, perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

- 5) Pemikiran filsafat dari sudut praktik penyelenggaraan akan bersentuhan dengan filsafat politik dan etika.

Sebab

Filsafat politik dan etika merupakan hasil dari praktik pemikiran.

Pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar.
- B. Jika (1) dan (3) benar.
- C. Jika (2) dan (3) benar.
- D. Jika (1), (2), dan (3) benar.

- 6) Objek material dari filsafat adalah
- (1) manusia
 - (2) sama dengan objek ilmu lainnya
 - (3) pembedaan sejarah manusia itu sendiri
- 7) Ilmu Pemerintahan termasuk ilmu
- (1) murni
 - (2) eksakta
 - (3) terapan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Menelusuri Jejak Pemikiran Filsafat Pemerintahan

Apabila kita akan menelusuri jejak pemikiran filsafat pemerintahan tentunya tidak akan terlepas dari perjalanan pemikiran filsafat pada umumnya. Filsafat pemerintahan sebagai salah satu dari sejumlah filsafat praktis, seperti filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat administrasi merupakan perkembangan pemikiran para filosof yang bersentuhan dengan kehidupan praktis umat manusia. Pemikiran tersebut muncul atas sejumlah fenomena kehidupan manusia agar tidak terlalu jauh ‘melenceng’ dari hakikat kebenaran. Secara garis besar babakan filsafat dapat dibagi dalam beberapa fase, yaitu Filsafat Klasik, Filsafat Abad Pertengahan, dan Filsafat Modern. Melalui fase ini kita dapat menelusuri berbagai pemikiran tentang filsafat dan juga filsafat pemerintahan.

A. FILSAFAT KLASIK

Orang yang diakui sebagai Bapak Filsafat ialah Thales (640–546 SM). Ia mendirikan aliran Filsafat Alam Semesta atau Kosmos, dengan mempertanyakan unsur tunggal apa yang menjadi dasar perubahan atau membentuk alam semesta ini. Para Filsuf memberi jawaban yang berbeda-beda, yaitu air, api, tanah atau udara. Menurut Aliran ini, Filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal usulnya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Jawaban ontologik pertama yang diberikan oleh Thales dengan menyatakan bahwa hakikat tersebut adalah air, sejenis *matter* (material). Paham Thales ini adalah bibit materialisme. Oleh karena ia hanya mengemukakan semacam zat saja maka materialisme Thales disebut materialisme monistik (*monistic materialism*).

Pemikiran Thales berbeda dengan Anaxagoras (500–428) yang mengatakan bahwa jenis materi itu bukan hanya satu, tetapi banyak atau tak terhingga. Aliran ini disebut materialisme pluralistik. Hal ini diperkuat oleh Anaximander (610–547) menyebut apeiron sebagai hakikat segala yang ada, yaitu sesuatu yang sifatnya tidak terbatas dan tidak berkeputusan. Dengan demikian, nampak terjadi pergeseran konsepsi filosofik dari Thales ke

Anaximander, dari mono ke plural, ke yang tak terbatas dan tak berkesudahan.

Sederetan nama lain yang sangat penting dalam menelusuri jejak pemikiran filsafat pemerintahan adalah Socrates (469–399 SM). Ia mengajarkan kepada khalayak terutama kaum muda, bahwa pengetahuan adalah kebajikan dan kebajikan adalah kebahagiaan. Menurutnya, Filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berbeda halnya dengan Plato (427–347 SM) Murid Socrates, Ia telah merubah pengertian Sophia (kearifan), dengan mengatakan bahwa para Filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran. Menurutnya, Filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran (Filsafat Spekulatif). Sedangkan Aristoteles (384–322 SM) Murid Plato, Ia menulis tentang apa yang disebutnya dalam bahasa Yunani *Prote Philosophia* (Filsafat Pertama) dengan memberi dua definisi terhadap istilah itu; (1) Ilmu tentang asas-asas pertama, (2) Ilmu yang menyelidiki peradaan sebagai peradaan dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alamnya sendiri.

B. FILSAFAT ABAD PERTENGAHAN

Abad pertengahan disebut juga *dark ages* terbentang antara tahun 476 Masehi sampai tahun 1000. Pada masa ini tinggal dua aliran filsafat yang berarti: pertama, sisa-sisa filsafat *Stoic* dan *Neoplatonisme*, dan kedua, sisa-sisa filsafat Aristoteles yang kemudian menyeberang ke dunia Islam dan Yahudi.

Aliran pertama dengan pandangan hidup *christianisme* membentuk Filsafat Patristik (pater = bapak; penguasa duniawi merangkap sebagai penguasa gereja). Tokoh aliran ini adalah Tertullianus (160–222) dan Augustinus (354–430), dan kemudian berkembang menjadi Filsafat Scolastik (abad ke-VIII).

Aliran kedua bersama-sama dengan pandangan hidup Islam di satu pihak dan dengan pandangan hidup bangsa Yahudi di lain pihak, membentuk berturut-turut apa yang oleh Amin Husin disebut sebagai Filsafat Islam, dan apa yang dikenal sebagai Filsafat Yahudi (*Jewish Philosophy*)

Masalah filsafat pada abad pertengahan ini adalah tentang wahyu dan akal budi, mana yang benar (dominan)? Salah satu pemikiran yang sangat

penting pada masa ini adalah penyelesaian Thomas yang terkenal sebagai aliran Thomisme. Di antara beberapa dalilnya, salah satu yang terkenal bahwa kebenaran akal budi tidaklah bertentangan dengan kebenaran wahyu.

C. FILSAFAT MODERN

Filsafat abad ke-15 sampai Immanuel Kant disebut filsafat modern. Filsafat modern didahului oleh gerakan sosial budaya yang disebut gerakan *renaissance* dan *humanisme*. *Renaissance* bermaksud mempelajari kembali filsafat klasik dan humanisme. Hal itu berarti proses penyadaran kembali akan martabat manusia dilanjutkan.

Dalam fase ini digambarkan bagaimana para filsuf modern mempelajari kembali filsafat klasik. Aliran materialisme klasik dan realisme (empirisme) Aristoteles di reorientasi oleh Francis Bacon (1561–1626), sedangkan aliran rasionalisme klasik dibangun kembali oleh Rene Descartes (1596–1650).

Menurut Bacon, bahwa metode deduktif dan silogisme Aristoteles tidak cukup, harus juga dipakai metode induktif dan eksperimental. Rasionalisme Descartes berangkat dari konsep ‘ada’. Bagaimana ia menyusun sistemnya dengan ini? Di mana terletak hakikatnya? Bagaimana prosesnya dalam *ratio*. Ucapannya yang terkenal, *cogito ergo sum* (aku berpikir oleh karena itu aku ada). Dengan demikian, ia memakai metode deduktif dari konsep umum, yaitu ada ke kenyataan (pengalaman). Bagaimana ia membenarkan *ratio*? Apakah *ratio* dapat dipercaya 100%? Ya, sebab *ratio* bertindak sesuai dengan kesadaran manusia. Kesadaran manusia sesuai dengan dunia yang disadari. Kesadaran ini berisi *innate ideas* yang benar. Dari manakah berawal idea ini? Dari Tuhan. Dengan demikian, jelaslah bahwa filsafat Descartes ini berlawanan dengan filsafat Bacon dan Locke, baik tentang objek maupun tentang metode.

Dalam sejarah filsafat pada abad pertengahan ini muncul berbagai pertentangan-pertentangan pokok, antara lain *pertama*, empirisme lawan rasionalisme; *kedua*, realisme lawan idealisme di bidang ontologia (hakikat). Kemudian pada perkembangan selanjutnya muncul lagi pertentangan baru, yaitu ketiga, materialisme lawan idealisme; keempat, monisme lawan dualisme; dan kelima, mekanisme lawan teleologisme.

Di tengah terjadinya pertentangan-pertentangan itu, muncul filsuf Immanuel Kant (1724–1804). Menurut Kant, satu aliran saja tidak dapat dan tidak mungkin diperluas secara universal: empirisme saja tak mampu,

idealisme saja tak sempurna. Di sini nampak bahwa Kant mengadakan suatu kritik yang positif. Kant-lah yang memperbaiki negativisme Hume lalu membangun suatu skeptisisme yang positif sehingga aliran Kant lazim juga disebut kritisisme.

Filsafat membuka wawasan dan membentangkan buah pikiran dan cara berpikir manusia dari dahulu sampai sekarang. Diharapkan, hal-hal itu dapat berfungsi sebagai alat dalam memahami persoalan tentang gejala dan hakikat pemerintahan. Jika pemerintahan dipandang sebagai bagian integral kegiatan politik, Ilmu Pemerintahan dianggap sebagai bagian ilmu politik dalam arti luas maka filsafat pemerintahan dapat dipelajari sebagai bagian filsafat politik.

Filsafat Pemerintahan dapat dipahami dan dikonstruksikan melalui metodologi pemikiran Walter Lippmann. Meskipun ia seorang pemikir politik, namun salah satu karyanya “The Public Philosophy” (1956) lebih berorientasi ke-pemerintahan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Metodologi Lippmann bermula dari pemikiran. Pemikiran berarti proses penemuan suatu yang belum diketahui, masih di belakang cakrawala (horizon), melalui pemikiran, ditemukan dan diketahui. Namun, setiap penemuan menciptakan cakrawala baru, horizon baru, demikian seterusnya.

Metafisika pemerintahan dapat dilihat sebagai sebuah misteri tentang kekuasaan yang objektif dan kekuatan yang berhadapan dengannya, yaitu manusia yang juga penuh misteri. Secara empirik kedua hal itu menunjukkan gejala-gejala yang disebut gejala pemerintahan: proses pemenuhan tuntutan pihak yang diperintah akan jasa-publik dan layanan-sipil yang semakin baik, semakin mudah, semakin adil, dan semakin murah, pada saat diperlukan. Gejala pemerintahan dianggap sebagai akibat (dampak) seperangkat sebab (dalam hubungan kausal). Hubungan kausal ini dikendalikan oleh seperangkat hukum, yang oleh Lippmann diberi nama *ius naturale*, yang dalam wacana filsafat Indonesia disebut hakikat. Dengan demikian, Filsafat Pemerintahan berkisar pada pertanyaan-pertanyaan tentang (1) hakikat pemerintahan, (2) metodologi yang dapat digunakan untuk menemukan hakikat tersebut, dan (3) hubungan antara hakikat dengan gejala pemerintahan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba diskusikan dengan teman-teman Anda tentang aliran-aliran yang berkembang pada fase filsafat klasik!
- 2) Coba pula diskusikan dengan teman-teman Anda tentang perbedaan-perbedaan pemikiran filsafat klasik dan filsafat abad pertengahan.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Beberapa filsuf yang muncul pada fase filsafat klasik, antara lain: Thales, Anaxagoras, Anaximander, Socrates, Plato, dan Aristoteles . Baca kembali bahasan tentang filsafat klasik. Jawablah dengan menggunakan kalimat Anda sendiri!
- 2) Perbedaan filsafat klasik dan filsafat abad pertengahan dapat dibandingkan dengan memahami pemikiran para filsuf yang muncul pada kedua fase ini. Baca kembali pemikiran para filsuf klasik dan abad pertengahan. Jawablah dengan menggunakan kalimat Anda sendiri!



RANGKUMAN

Secara garis besar perjalanan pemikiran filsafat dapat dibagi dalam beberapa fase, yaitu Filsafat Klasik, Filsafat Abad Pertengahan, dan Filsafat Modern.

Dalam filsafat klasik muncul dua aliran yang berbeda, yaitu materialisme monistik yang dipelopori oleh Thales dan materialisme pluralistik yang dipelopori oleh Anaxagoras dan Anaximander. Pemikir-pemikir lain yang juga berpengaruh pada fase ini, antara lain Socrates, Aristoteles, dan Plato. Pemikiran-pemikirannya memberi arti yang khas sebagai filsuf yang hidup pada masa filsafat klasik.

Dalam masa abad pertengahan terkenal dua aliran filsafat, yaitu *pertama*, sisa-sisa filsafat Stoic dan Neoplatonisme; *kedua*, sisa-sisa filsafat Aristoteles yang kemudian menyeberang ke dunia Islam dan Yahudi. Aliran pertama dengan pandangan hidup *christianisme* membentuk Filsafat Patristik. Tokoh aliran ini adalah Tertullianus (160–222) dan Augustinus (354–430). Kedua bersama-sama dengan

pandangan hidup Islam di satu pihak dan dengan pandangan hidup bangsa Yahudi di lain pihak, membentuk berturut-turut apa yang oleh Amin Husin disebut sebagai Filsafat Islam, dan apa yang dikenal sebagai Filsafat Yahudi (*Jewish Philosophy*)

Filsafat abad ke-15 sampai Immanuel Kant disebut filsafat modern. Menurut Kant, satu aliran saja tidak dapat dan tidak mungkin diperluas secara universal empirisme saja tak mampu, idealisme saja tak sempurna. Di sini nampak bahwa Kant mengadakan suatu kritik yang positif. Kant-lah yang memperbaiki negativisme Hume lalu membangun suatu skeptisisme yang positif sehingga aliran Kant lazim juga disebut kritisisme.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Secara garis besar babakan filsafat dapat dibagi dalam beberapa fase, *kecuali*
 - A. filsafat Yunani
 - B. filsafat Klasik
 - C. filsafat Abad Pertengahan
 - D. filsafat Modern

- 2) Orang yang dianggap sebagai bapak filsafat ialah
 - A. Socrates (469–399 SM)
 - B. Plato (427–347 SM)
 - C. Aristoteles (384–322 SM)
 - D. Thales Thales (640–546 SM)

- 3) Filsafat Thales mempertanyakan bahwa unsur tunggal apa yang menjadi dasar perubahan atau membentuk alam semesta ini. Jawaban ontologik yang pertama diberikan oleh Thales adalah
 - A. udara
 - B. api
 - C. air
 - D. tanah

Pilihlah:

- A. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar dan mempunyai hubungan sebab akibat.
 - B. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat.
 - C. Apabila salah satu dari kedua pernyataan benar.
 - D. Apabila kedua pernyataan salah.
- 4) Filsafat Thales disebut sebagai materialisme monistik (*monistic materialism*)
- Sebab
- Paham Thales hanya mengemukakan semacam zat saja.
- 5) Tales dan Anaxagoras merupakan dua filsuf yang memiliki pemikiran yang sama tentang alam semesta.
- Sebab
- Kedua filsuf tersebut termasuk dalam aliran pluralistik

Pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar.
 - B. Jika (1) dan (3) benar.
 - C. Jika (2) dan (3) benar.
 - D. Jika (1), (2), dan (3) benar.
- 6) Dalam masa abad pertengahan terkenal dua aliran filsafat, yaitu
- (1) sisa-sisa filsafat Stoic dan Neoplatonisme
 - (2) sisa-sisa filsafat Aristoteles yang kemudian menyeberang ke dunia Islam dan Yahudi
 - (3) Sisa-sisa filsafat materialisme monistik dan pluralistik
- 7) Dalam sejarah filsafat pada abad pertengahan ini muncul berbagai pertentangan- pertentangan pokok, antara lain
- (1) empirisme lawan rasionalisme
 - (2) realisme lawan idealisme di bidang ontologia (hakikat)
 - (3) materialisme lawan idealisme
- 8) Metafisika pemerintahan dapat dilihat sebagai sebuah misteri, yaitu
- (1) kekuasaan yang objektif
 - (2) tujuan pemerintahan yang penuh misteri
 - (3) kekuatan yang berhadapan dengannya, yaitu manusia yang juga penuh misteri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Tinjauan Filosofis tentang Tanggung Jawab Pemerintahan

☉ dalam kehidupan sehari-hari tentunya Anda sudah terbiasa dengan istilah tanggung jawab, baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab sosial. Tanggung jawab berkaitan dengan peran seseorang dalam kehidupan sehingga semakin besar peran seseorang semakin besar pula tanggung jawabnya. Hal penting Anda camkan bahwa manusia tidak pernah akan lepas dari tanggung jawab minimal tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Mungkin Anda bertanya-tanya dalam hati kenapa mesti harus bertanggung jawab? Jawaban sederhananya adalah agar manusia tidak bertindak 'liar, buas', dan semaunya. Dengan kata lain, keteraturan hidup manusia dapat berjalan sebagaimana layaknya. Bukankah manusia telah dianugrahi Tuhan 'kebebasan'? Anugrah kebebasan tersebut tidak 'gratis' karena sebagai orang yang beriman kita meyakini dan mempercayai bahwa segala perbuatan kita nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Jadi, hakikat tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi dari kebebasan yang kita miliki. Begitu pula halnya dalam kehidupan pemerintahan; secara sosial pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilihnya dan sekaligus dilayaninya, tetapi secara pribadi sebagai manusia karena ia 'memilih' jabatan pemerintahan sebagai pilihan hidupnya maka nantinya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan yang menganugerahkan kehidupan.

A. PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB

Istilah tanggung jawab (*responsibility*) berasal dari akar kata Latin *respons* (us). Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai terpenting yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Spiro mendefinisikan *responsibility* ke dalam tiga aspek; (1) *accountability* (perhitungan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas oleh bawahan atau yang diberi kuasa dalam batas-batas kekuasaan yang diterimanya; (2) *obligation* (kewajiban), yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan

dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara dan sebagai pelaku pemerintahan; (3) *cause*, yaitu faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas.

Berbeda halnya dengan Carroll, ia tidak memberikan definisi tentang *responsibility*, melainkan berusaha meletakkan *responsibility* dalam tiga tahap; (1) *largely defensive (social obligation)*; (2) *somewhat more reactive (social responsibility)*; (3) *anticipatory dan preventive (social responsiveness)*. Menurut Carroll, tingkat pertanggungjawaban yang tertinggi adalah yang terakhir. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, apabila dilihat dari bagaimana cara menangani persoalan pemerintahan secara umum dikaitkan dengan kategori Carroll tersebut dapat dicontohkan, misalnya masa pemerintahan Soeharto bersifat represif, masa pemerintahan Habibie pada umumnya reaktif, dan masa pemerintahan Gus Dur bersifat defensif.

Secara sederhana, tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.

B. ISI PERTANGGUNGJAWABAN

Ilmu administrasi mengajarkan, bahwa di mana ada kewenangan, di situ diperlukan tanggung jawab. Dari sudut psikologi, sikap bertanggung jawab dianggap sebagai salah satu tanda kedewasaan. Integritas pribadi seseorang ditunjukkan oleh kesediaan memikul tanggung jawab dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Apa saja yang harus dipertanggungjawabkan? Hal yang harus dipertanggungjawabkan terkandung di dalam definisi tanggung jawab menurut Spiro, yaitu sebagai berikut.

1. Penggunaan wewenang yang diterima dari sumbernya.
2. Sumpah jabatan (janji kepada Allah, manusia dan diri sendiri).
3. Janji-janji kepada yang diperintah (rakyat) melalui pidato, kampanye, tindakan, dan ucapan.
4. Komitmen pribadi atau pilihan bebas menerima jabatan yang bersangkutan.
5. Tindakan yang dilakukan atas prakarsa sendiri (Freies Ermessen, discretion).
6. Tindakan pribadi (oknum).
7. Warisan pejabat pendahulunya.

Mengacu pada pendapat Spiro maka hal yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum di dalam *job discription* atau mandat yang diterima hasil-hasilnya, tetapi juga kegagalan, faktor-faktornya, dan/atau dampak negatifnya di dalam masyarakat.

C. ASAS-ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam berbagai literatur dapat ditemukan berbagai asas pertanggungjawaban, antara lain berikut ini.

1. Terbuka (transparan) timbal balik, artinya keterbukaan kedua belah pihak.
2. Langsung, artinya langsung kepada konsumen secara pribadi, tidak melalui perwakilan.
3. Informatif dan tuntas, artinya setiap orang berhak mendapat informasi yang jelas, faktual, dan tuntas.
4. Evaluable, artinya pertanggungjawaban yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut.
 - a. Data pertanggungjawaban jelas, *sufficient*, dan mudah diukur.
 - b. Ada alat ukur yang *valid* dan *reliable*.
 - c. Diukur oleh lembaga yang kompeten dan netral.
 - d. Cukup waktu untuk penganalisan.
 - e. *Feedback* terkomunikasikan dengan efektif.
5. Konsumeristik, artinya pertanggungjawaban dan evaluasinya selalu dilihat dari sisi kepentingan konsumen.

D. BATAS DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

Batas-batas pertanggungjawaban dapat dilihat dalam dua segi, yaitu *objektif* dan *subjektif*. Dari segi objektif, ada tiga macam pegangan; (1) seorang bertanggung jawab sejauh perintah atau tugas yang diterimanya. Dalam hubungan ini, tanggung jawab dibuat dalam bentuk laporan; (2) seseorang bertanggung jawab sejauh komitmen atau perjanjian. Di sini tanggung jawab yang diharapkan berbentuk kewajiban untuk menepati, menunaikan, dan memenuhi hal-hal yang dijanjikannya; (3) seseorang bertanggung jawab sejauh status dan peran dirinya di dalam peristiwa atau keadaan yang dihadapi pada suatu saat. Pertanggungjawaban di sini

diaktualisasikan dalam bentuk kesediaan menanggung akibat, risiko, dan dampak tindakan yang diambilnya sesuai dengan keputusan batin berdasarkan pilihan bebas. Sedangkan dari sudut subjektif, seseorang bertanggung jawab sejauh ia tahu (sadar), mau (sepakat), dan mampu (*able*, sarana memadai, sehat).

Bentuk dan sifat pertanggungjawaban erat kaitannya dengan isi dan batas pertanggungjawaban dan dengan evaluasi pelaksanaan tugas. Dalam Ilmu Hukum dikenal dua hal yang dijadikan sasaran pertanggungjawaban, yaitu *rechtsmatigheid* dan *doelmatigheid*. Pertama berhubungan dengan pertanyaan sampai di mana pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan dan masih berlaku, sedangkan yang kedua berhubungan dengan pertanyaan sampai di mana tujuan (sasaran) pelaksanaan tugas tercapai (*effectiveness*).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda diskusikan dengan teman-teman Anda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintahan itu!
- 2) Coba pula diskusikan dengan teman-teman Anda tentang letak pentingnya tanggung jawab pemerintahan itu!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai terpenting yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Baca kembali uraian yang membahas tentang tanggung jawab pemerintahan!
- 2) Letak pentingnya tanggung jawab pemerintahan dapat diketahui dengan memahami isi pertanggungjawaban, asas-asas pertanggungjawaban, batas dan bentuk pertanggungjawaban. Baca kembali uraian yang membahas tentang pentingnya tanggung jawab pemerintahan!



RANGKUMAN

Istilah tanggung jawab (*responsibility*) berasal dari akar kata Latin *respons(us)*. Secara sederhana, tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.

Hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum di dalam *job discription* atau mandat yang diterima hasil-hasilnya, tetapi juga kegagalan, faktor-faktornya, dan atau dampak negatifnya di dalam masyarakat.

Bentuk dan sifat pertanggungjawaban erat kaitannya dengan isi dan batas pertanggungjawaban dan dengan evaluasi pelaksanaan tugas. Dalam Ilmu Hukum dikenal dua hal yang dijadikan sasaran pertanggungjawaban, yaitu *rechtsmatigheid* dan *doelmatigheid*.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah tanggung jawab (*responsibility*) berasal dari akar kata Latin, yaitu
 - A. *respons(us)*
 - B. *responsive*
 - C. *responsible*
 - D. *responsiusnes*

- 2) Perbedaan antara Spiro dan Caroll dalam menyoroti persoalan tanggung jawab, yaitu
 - A. Spiro mendefinisikan *responsibility* ke dalam tiga aspek, sedangkan Carroll tidak memberikan definisi tentang *responsibility*.
 - B. Carroll mendefinisikan *responsibility* ke dalam tiga aspek, sedangkan Spiro tidak memberikan definisi tentang *responsibility*.
 - C. Spiro tidak memberikan definisi tentang *responsibility*, melainkan berusaha meletakkan *responsibility* dalam tiga tahap.
 - D. Semua jawaban salah

Pilihlah:

- A. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar dan mempunyai hubungan sebab akibat.
 - B. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat.
 - C. Apabila salah satu dari kedua pernyataan benar.
 - D. Apabila kedua pernyataan salah.
- 3) Secara sederhana, tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*.
Sebab
Tanggung jawab itu merupakan janji yang harus dipenuhi baik kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.
- 4) Dari sudut psikologi, sikap bertanggung jawab dianggap sebagai salah satu tanda kedewasaan.
Sebab
Integritas pribadi seseorang ditunjukkan oleh kesediaan memikul tanggung jawab dan tidak melemparkannya kepada orang lain.

Pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar.
 - B. Jika (1) dan (3) benar.
 - C. Jika (2) dan (3) benar.
 - D. Jika (1), (2), dan (3) benar.
- 5) Spiro mendefinisikan responsibility ke dalam tiga aspek, yaitu
(1) *accountability*
(2) *obligation*
(3) *cause*
- 6) Beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan menurut Spiro, antara lain
(1) penggunaan wewenang yang diterima dari sumbernya
(2) seluruh ucapan yang ditujukan kepada orang lain
(3) sumpah jabatan (janji kepada Allah, manusia dan diri sendiri)
- 7) Beberapa macam pegangan dalam melakukan pertanggungjawaban dari segi objektif, antara lain
(1) seorang bertanggung jawab sejauh perintah atau tugas yang diterimanya

- (2) seseorang bertanggung jawab sejauh komitmen atau perjanjian
- (3) seseorang bertanggung jawab sejauh status dan peran dirinya di dalam peristiwa atau keadaan yang dihadapi pada suatu saat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Pengakuan tentang adanya hari kemudian atau akhirat.
- 2) D. Asal mula, susunan metode dan sahnya pengetahuan seperti filsafat pengetahuan.
- 3) C. Salah apabila filsafat membuat petunjuk teknis untuk membuat sesuatu.
- 4) C. Semua pernyataan itu benar.
- 5) B. Kedua pernyataan itu benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.
- 6) A. Objek material dari suatu filsafat adalah manusia sama dengan ilmu lainnya, yang membedakan adalah dari sudut pandang mana suatu ilmu menyoroti “manusia” itu.
- 7) B. Ilmu Pemerintahan tidak termasuk ilmu eksakta.

Tes Formatif 2

- 1) B. Babakan filsafat terdiri dari filsafat klasik, abad pertengahan dan filsafat modern.
- 2) A. Socrates, Plato dan Aristoteles bukan bapak filsafat.
- 3) A. Jawaban ontologi yang pertama diberikan oleh Thales adalah air.
- 4) C. Kedua pernyataan itu benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat.
- 5) A. Kedua pernyataan tersebut salah.
- 6) A. Sisa-sisa filsafat materialisme monistik dan pluralistik bukan merupakan aliran filsafat abad pertengahan.
- 7) D. Semua jawaban benar.
- 8) B. Salah jika tujuan pemerintahan merupakan mystery.

Tes Formatif 3

- 1) A. Istilah *responsibility* berasal dari akar kata latin *respons(us)*.
- 2) A. Spiro memberikan definisi *responsibility*, sedangkan Carroll tidak.
- 3) A. Kedua pernyataan benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat.
- 4) A. Kedua pernyataan benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat.
- 5) D. Tiga hal itu bukan pemikiran Spiro, melainkan merupakan pemikiran Carroll.
- 6) B. Salah karena yang harus dipertanggungjawabkan adalah seluruh ucapan yang ditujukan kepada orang lain, bukan pemikiran Spiro.
- 7) D. Oleh karena seluruh jawaban benar.

Glosarium

- Accountability* : (perhitungan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas oleh bawahan atau yang diberi kuasa dalam batas-batas kekuasaan yang diterimanya.
- Cause* : faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas.
- Cogito ergo sum* : (aku berpikir oleh karena itu aku ada) pendapat Descartes tentang hakikat 'ada'.
- Ius naturale* : dalam wacana filsafat Indonesia disebut hakikat.
- Obligation* : (kewajiban), yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara dan sebagai pelaku pemerintahan.
- Phylosophy* : cinta kearifan, filsafat dapat diartikan sebagai upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia mengenai hakikat sesuatu secara mendasar.
- Rechtsmatigheid* : berhubungan dengan pertanyaan sampai di mana pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan dan masih berlaku.
- Responsibility* : kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.
- Thomisme* : aliran filsafat Thomas yang terkenal dalilnya bahwa kebenaran akal budi tidaklah bertentangan dengan kebenaran wahyu.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Delgaaouw, Bernard. (1988). *Filsafat Abad 20*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Handyaningrat, Soewarno. (1983). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Iver, Mac. (1985). *Jaring-jaring Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru. Hal. 11–32.
- Kattsoff, Louis O. (1992). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kumorotomo, Wahyudi. (1994). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Musanef. (1983). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Ndraha, Taliziduhu. (1983). *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peursen, C.A. Van. (1989). *Susunan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gramedia.
- _____. (1990). *Fakta, Nilai, Peristiwa*. Jakarta: Gramedia.
- Suryaningrat, Bayu. (1987). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru. Hal. 1–52.

Suseno, Frans Magnis. (1987). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
Hal. 167–179.

Syafiie, Inu Kencana. (1992). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Eresco.

_____. (1993). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Eresco.

_____. (1994). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Manadar Maju.

Widjaya, A.W. (1991). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.